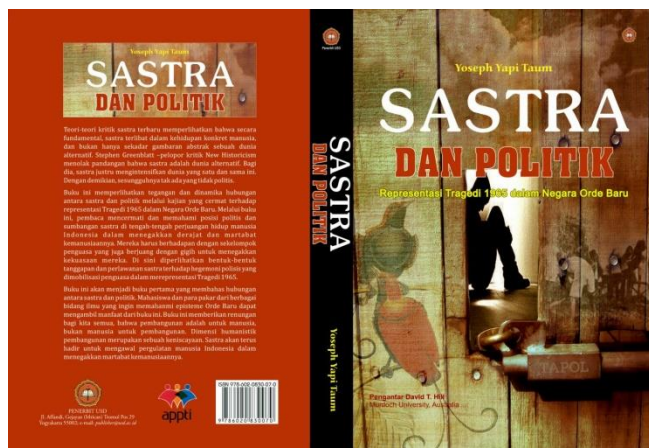


**Hasil Diskusi Klub Baca Badan Bahasa**  
**Pertemuan III (Senin, 20 Maret 2017)**  
**Tema: Sastra dan Politik**  
**Pembahas: Eva Yenita Syam**



Buku yang dibahas dalam pertemuan ketiga adalah *Sastra dan Politik Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru* (2015) karya Yoseph Yapi Taum terbitan USD, Yogyakarta. Buku ini memperlihatkan tegangan dan dinamika hubungan antara sastra dan terhadap representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru.

Melalui buku ini, pembaca dapat mencermati dan memahami posisi

politis dan sumbangan sastra di tengah-tengah perjuangan hidup manusia Indonesia dalam menegakkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Mereka harus berhadapan dengan sekelompok penguasa yang juga berjuang dengan gigih untuk menegakkan kekuasaan mereka. Di sini diperlihatkan bentuk-bentuk tanggapan dan perlawanan sastra terhadap hegemoni politik yang dimobilisasi penguasa dalam merepresentasi Tragedi 1965.

Masyarakat cenderung memandang bahwa hukuman pembunuhan massal terhadap ratusan ribu orang-orang PKI dalam Tragedi 1965 bertujuan mendapatkan keadilan karena PKI telah melakukan pembunuhan keji di Lubang Buaya. Hukuman pembantaian itu, dalam kenyataannya, bukan untuk mendapatkan keadilan, melainkan untuk menegakkan kekuasaan Orde Baru.

Dengan menggunakan pendekatan *new historicism*, buku ini melihat peristiwa 1965 dari sudut pandang korban dan tentu saja mengambil sikap keberpihakan kepada para korban. Karya sastra yang dihasilkan pada masa itu hanya dipahami sebagai karya fiksi; karya sastra seolah-olah tidak boleh terhubung langsung dengan kehidupan nyata.

Dengan kata-kata yang sangat ringan, buku ini sangat informatif dan seakan-akan mengembalikan ingatan kita yang terkubur atau sengaja dikubur sehingga kita tidak mampu mengingat peristiwa kelam tersebut dengan baik. Selain karya-karya sastra, buku ini menggunakan artikel-artikel media massa sebagai sumber data.

**Rangkuman hasil diskusi:**

1. Perkembangan sastra pada zaman Orde Lama mengalami banyak tantangan. Salah satunya adalah munculnya kubu sastra untuk rakyat dan sastra untuk seni (yang ditandai dengan adanya Manifestasi Kebudayaan (Manikebu)). Salah satu alasan Manikebu menolak sastra untuk rakyat adalah adanya pendapat bahwa sastra yang hanya berpihak kepada rakyat bersifat apolitis sehingga akan menimbulkan

ketiadaan seni dalam karya-karya sastra untuk rakyat. Namun, kubu sastra untuk rakyat yang dimotori Lekra (Lembaga Kedaulatan Rakyat) berhasil memengaruhi Soekarno untuk melarang Manikebu.

2. Periode sastra tahun 50-an disebut periode yang hilang. Salah satu cara untuk memahami perkembangan sastra pada tahun 1965 adalah dengan menelusuri kembali perkembangan sastra sebelum tahun tersebut. Kajian tentang perkembangan sastra tahun 50-an setidaknya akan dapat memberikan gambaran tentang keadaan sastra pada zaman demokrasi liberal.
3. Kehidupan politik saat ini seperti merefleksikan kembali situasi politik pada tahun 1950-an; zaman diterapkannya demokrasi liberal, suatu masa politik yang ditandai dengan hidupnya begitu banyak partai.
4. Tragedi 1965 terjadi karena paham komunisme yang dibawa oleh Muso dan kawan-kawan ke Indonesia menginginkan pergantian paham negara dengan cara revolusi. Cara yang sangat berisiko mengingat paham ini belum sempat menunjukkan kontribusinya terhadap negara Indonesia.
5. Di era kebebasan informasi ini sudah ada karya-karya atau garapan-garapan (baik buku maupun film) yang menyajikan informasi tentang Tragedi 1965 dari sudut pandang yang “berbeda“. Kenyataan ini mengakibatkan adanya “dualisme“ pandangan: PKI adalah pihak yang bersalah atau pemuda Pancasila sebagai pihak pembantai.